

PENERAPAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN SESUAI DENGAN ISAK 35 PADA PARTAI POLITIK GOLONGAN KARYA

Dina Syafa Rina, Haifa Nurilfaruqi, Aprilia Rizka Rahmawati
Universitas Tidar

Email: dinasyafa05@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Partai Politik Golongan Karya yang merupakan salah satu jenis entitas nirlaba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Partai Golongan Karya bila ditinjau dari Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35). Objek penelitian ini adalah Partai Politik Golongan Karya. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui pengeksplorasian laporan keuangan Partai Golongan Karya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Politik Golongan Karya sudah bisa dikatakan transparan tetapi belum bisa dikatakan akuntabel. Laporan keuangan Partai Golongan Karya belum menerapkan standar akuntansi ISAK 35. Jika dikaitkan dengan penerapan laporan keuangan yang sudah diolah menggunakan ISAK 35 laporan keuangan tersebut juga bisa diterapkan dalam Partai Politik Golongan Karya.

Kata Kunci: ISAK 35

ABSTRACT

This research was conducted at the Golongan Karya Political Party, which is a type of non-profit entity. This research aims to determine the implementation of financial management accountability in the Golongan Karya Party when viewed from the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK 35). The object of this research is the Golongan Karya Political Party. The analytical method used is a quantitative descriptive method with data collected through exploring the financial reports of the Golongan Karya Party. The results of this research show that the Golongan Karya Political Party can be said to be transparent but cannot be said to be accountable. The Golongan Karya Party's financial reports have not yet implemented the ISAK 35 accounting standard. If this is related to the application of financial reports that have been processed using ISAK 35, these financial reports can also be applied to the Golongan Karya Political Party.

Keywords: ISAK 35

PENDAHULUAN

Partai Politik menurut Pasal UU Nomor 2 Tahun 2011 adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dimana partai politik berperan sebagai wadah rekrutmen politik dalam arti menyiapkan calon-calon anggota legislatif, juga meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan menciptakan iklim yang kondusif dalam proses pemilu demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.

Semua aktivitas partai politik dalam setiap kegiatan tentu memiliki pengurus yang diharuskan melakukan pencatatan laporan keuangan untuk mengontrol setiap pendapatan dan pengeluaran yang terjadi sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Tujuan pembuatan laporan keuangan dimaksudkan untuk memudahkan para penggunaanya dalam pengambilan keputusan (Hery, 2020:18). Selain itu laporan keuangan berguna sebagai akuntabilitas dan transparansi kepada publik, sebagai bentuk pengurus atas Amanah dana yang telah diberikan. Sehingga adanya penyusunan laporan keuangan untuk menjadi salah satu bukti kepercayaan pihak internal maupun eksternal khususnya bagi anggota, penyumbang (donatur) bahwa yang mereka sumbangkan benar-benar digunakan dengan baik.

Menurut ISAK 35 penyajian laporan keuangan yang berorientasi nonlaba terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan keuangan komprehensif, laporan perubahan asset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Namun, berdasarkan beberapa penelitian penerapan pada pelaporan keuangan organisasi nonlaba belum terlaksana dengan baik dan benar sesuai ISAK 35, tujuan diterapkannya penyusunan laporan keuangan sesuai ISAK 35 untuk menunjukkan bukti pertanggungjawaban dan informasi yang lengkap sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Partai Politik Golongan Karya telah menerapkan pelaporan keuangan kepada publik secara transparan tetapi belum akuntabilitas. Hal disebabkan karena Partai Politik Golongan Karya belum menerapkan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK 35) pada pelaporan keuangannya. Hal tersebut dapat dibuktikan pada data pelaporan

keuangan yang diperoleh bahwa Partai Golongan Karya hanya membuat pencatatan berupa laporan posisi keuangan (Neraca).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Partai Golongan Karya

Partai Golongan Karya (Partai Golkar) sebelumnya bernama Golongan Karya dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), yang didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman. Golongan Karya (Golkar) muncul dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Ketiganya, mengajukan gagasan integralistik-kolektivitis sejak 1940. Saat itu, gagasan tiga tokoh ini mewujudkan dengan adanya Golongan Fungsional. Dari nama ini, kemudian diubah dalam bahasa Sansekerta sehingga menjadi Golongan Karya pada 1959. Hingga kini, Golongan Karya dikenal dalam dunia politik nasional sebagai Golkar.

Pada awal berdiri, Golkar bukan mewujudkan sebuah partai, melainkan perwakilan golongan melalui Golongan Karya. Ide awal Golkar yaitu sebagai system perwakilan dan dasar perwakilan Lembaga-lembaga representatif. Tahun 1957 adalah masa awal berdirinya organisasi Golkar. Golkar juga memiliki tujuan untuk membangun organisasi masyarakat atau ormas. Golkar beralih menjadi sebuah partai politik Ketika Bung Karno yang bertindak sebagai konseptor dan Jendral TNI(Purn) Abdul Haris Nasution yang berfungsi sebagai penggerak, bersama dengan Angkatan Darat, mengubah Golkar sebagai sebuah partai politik untuk melawan PKI. Hal ini bertentangan dengan konsep awal Golkar yang menolak konsep partai dan PKI yang menuntut perbedaan kelas. Golkar memiliki konsep untuk menumbuhkan persatuan dan Kerjasama. Akhirnya, Golkar yang anti partai runtuh menjadi sebuah partai.

Analisis Implementasi ISAK 35 Tentang Laporan Keuangan Entitas Nirlaba

Dalam penelitian ini yang menjadi dasar penelitiannya adalah laporan keuangan yang dimiliki oleh partai Golongan Karya. Laporan keuangan ini kemudian dianalisis sesuai dengan ketentuan ISAK 35 yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan untuk mendapatkan hasil apakah aturan-aturan yang terdapat dalam ISAK 35 sudah diimplementasikan pada penyajian laporan keuangan entitas ini.

a. Format Pelaporan Keuangan

Dalam penyusunan laporan keuangan Partai Golongan Karya dilakukan oleh bagian keuangan partai yaitu pengurus bagian keuangan Bendahara, Berikut ini disajikan format laporan posisi keuangan DPP Partai Golongan Karya tahun 2022.



Laporan Keuangan DPP Partai Golkar Tahun 2022

DPP PARTAI GOLKAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA)
PER 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>2022</u>
ASET	
ASET LANCAR	
Kas dan Setara Kas	405.772.449
Piutang lain-lain	140.674.985
Uang muka	
Jumlah Aset Lancar	<u>546.447.434</u>
ASET TETAP	
Aset Tetap - Bersih	39.270.957.610
Bangunan dalam proses	-
Jumlah Aset Tetap	<u>39.270.957.610</u>
JUMLAH ASET	<u><u>39.817.405.044</u></u>
LIABILITAS DAN ASET BERSIH	
LIABILITAS	
Utang Pajak	1.238.670
Utang lainnya	
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	-
Jumlah Liabilitas	<u>1.238.670</u>
ASET BERSIH	
Tidak Terikat	39.816.166.374
Jumlah Aset Bersih	<u>39.816.166.374</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH	<u><u>39.817.405.044</u></u>

Dari tabel laporan keuangan tersebut dapat dijelaskan bahwa format pelaporan keuangan dari partai Golongan Karya hanya mempunyai pencatatan laporan posisi keuangan saja, tidak ada laporan arus kas, laporan aktivitas dan catatan atas

laporan keuangan seperti mengacu pada ISAK 35 sebagaimana menjadi dasar pedoman dalam pembuatan laporan keuangan entitas nirlaba.

b. Klasifikasi Aset dan Liabilitas

Dari laporan Posisi Keuangan partai dikatakan bahwa Partai Golkar mengelompokkan aset ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar dan Partai Golkar mengelompokkan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang terhadap pelaporan keuangannya.

c. Klasifikasi Aset Neto Terikat atau Tidak Terikat

Aset Neto Terikat yaitu, sumber daya dari penyumbang yang dibatasi penggunaannya untuk tujuan tertentu. Sedangkan Aset Neto Tidak Terikat, kebalikan dari aset neto terikat, penggunaan untuk tujuan tertentu tidak dibatasi oleh penyumbang. Dapat disimpulkan dari laporan yang ada pada Partai Golkar dana dari penyumbang tidak terikat atau bisa dibilang penyumbang tidak membatasi penggunaan untuk tujuan tertentu dari Partai Golkar.

d. Perubahan Kelompok Aset Neto

Pada Partai Golkar hanya terdapat aset yang bersifat tidak terikat, tetapi hanya disajikan pada pelaporan keuangan sederhana partai tanpa ada keterangan lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan pada Partai Golkar hanya melakukan pencatatan berupa laporan posisi keuangan (Neraca) dan kurangnya pengertian atau pengetahuan mengenai penyusunan laporan keuangan yang benar untuk entitas nirlaba sesuai ISAK 35.

e. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan dan Kerugian

Dalam pelaporan keuangan Partai Golkar tidak menyajikan laporan yang berupa aktivitas, sedangkan sumbangan yang diterima Partai Golkar bersifat tidak terikat dan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat.

f. Informasi Pendapatan dan Beban

Pada Partai Golkar tidak menyajikan pelaporan keuangan berupa pendapatan dan beban secara bruto.

g. Informasi Pemberian Jasa

Dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Partai Golkar dapat disimpulkan bahwa Partai Golkar tidak mencatat rincian beban berdasarkan kegiatan dan operasional partai.

h. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan (Neraca) pada Partai Golkar dapat dilihat jelas bahwa Partai Golkar tidak mencatat dan mengklasifikasi laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35.

Pembahasan

Berdasarkan Pelaporan Keuangan pada Partai Golongan karya dapat dilihat bahwa pelaporan tersebut belum cukup sesuai dengan pelaporan keuangan ISAK 35. Pada indikator pertama mengenai format dari pelaporan keuangan, partai Golkar tidak menyajikan 4 dari 5 komponen yang ada yaitu, laporan aktivitas/komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Indikator yang kedua pada perubahan kelompok aset neto, Partai Golkar tidak menyajikan perubahan aset neto. Indikator yang ketiga mengenai mengenai klasifikasi pada pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian karena Partai Golkar tidak menyajikan pelaporan beserta aktivitasnya. Indikator yang keempat yaitu mengenai pendapatan dan beban secara bruto. Indikator yang kelima Partai Golkar tidak menyajikan keterangan tentang pemberian jasa, tidak menyajikan informasi mengenai beban sesuai klasifikasi. Indikator yang keenam atau terakhir yaitu mengenai penerimaan dan pengeluaran kas, Partai Golkar tidak menyajikan pemisah arus kas dengan keterangan.

Pada indikator diatas dapat disimpulkan, bahwa pelaporan keuangan Golongan Karya yang berbentuk Laporan Posisi Keuangan (Neraca) tersebut masih jauh dari kata sesuai dengan standar akuntansi ISAK 35. Hal tersebut dikarenakan pada Partai Golongan Karya tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap, maka dapat dikatakan bahwa Menyusun suatu laporan keuangan bukan hal yang mudah untuk diterapkan apalagi pada organisasi nirlaba partai politik yang sumber dayanya belum terlalu cukup.

Dapat dilihat pada Partai Politik Golongan Karya, masalah utama yang menjadi penghambat pelaporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi ISAK 35 yaitu karena kurangnya sumber daya, seperti tidak adanya pengadaan aset, pengurus partai yang tidak berlatar belakang ekonomi atau akuntansi, kurangnya pengetahuan tentang laporan keuangan standar akuntansi dan partai yang berada didaerah hanya membuat pelaporan penggunaan dana yang sederhana. Sehingga cukup sulit untuk Partai Golongan Karya untuk mengimplementasikan laporan keuangan sesuai standar

akuntansi ISAK 35. Namun pada Partai Golongan Karya sudah mampu menyusun format Laporan Posisi Keuangan (Neraca) sesuai dengan salah satu komponen ISAK 35.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini adalah ketidaksempurnaan partai politik Golongan Karya dalam menyusun laporan keuangannya dengan tinjauan ISAK 35. Ketidaksempurnaan tercermin dari laporan yang belum lengkap sesuai dengan ISAK 35, artinya bahwa laporan keuangan partai politik Golongan Karya belum akuntabel. Partai Golongan Karya hanya melaporkan atau menyajikan laporan posisi keuangan saja. Akan tetapi partai Golongan Karya mempublikasikan hasil dari laporan posisi keuangan dengan hal itu bisa dikatakan transparan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa partai politik Golongan Karya sudah menerapkan prinsip transparansi, namun belum menerapkan prinsip akuntabel.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran yang membangun sebagai berikut :

- a. Untuk partai politik ini diharapkan menyusun laporan keuangannya lebih detail dan diperluas yang sesuai dengan ISAK 35.
- b. Untuk partai politik ini di harapkan menyajikan laporan kelompok aset, klasifikasi pendapatan dan beban agar pembaca paham terkait laporan keuangannya.
- c. Saran untuk peneliti diharapkan dapat meneliti perkembangan laporan keuangan partai politik ini untuk tahun-tahun yang akan datang dan dapat mengetahui perkembangan implementasi ISAK 35.

DAFTAR PUSTAKA

<https://journal.yrpiiku.com/index.php/msej/article/view/1442>

<https://www.partaigolkar.com/wp-content/uploads/2023/06/Laporan-Neraca-Tahun-2022.pdf>

<https://jurnal.wicida.ac.id/index.php/sebatik/article/download/772/189/>

<https://ojs.unsulbar.ac.id/index.php/jepa/article/view/513/253>